



**PEMERINTAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA**

**RENCANA  
KERJA**

**TAHUN  
2023**

**DINAS PERPUSTAKAAN**



Jl. A. Yani no. 02 Amuntai

[perpustarda.hsu@gmail.com](mailto:perpustarda.hsu@gmail.com)



(0527) 61015

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

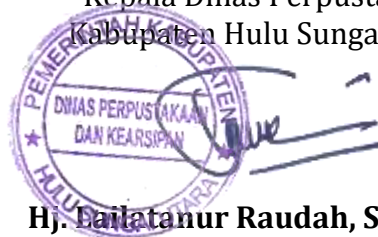
Dengan tersusunnya Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2023 difokuskan pada Renja tersebut.

Kami menyadari Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Renja ini. Dan semua pihak yang membuat dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terimakasih.

Amuntai, April 2022

Kepala Dinas Perpustakaan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara



**Hj. Fatmahanur Raudah, S.Sos, M.Si**  
Pembina

NIP. 19620818 198302 2 003

## DAFTAR ISI

<b>ISI</b>	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
ISI Halaman.....	ii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN .....	3
BAB II.....	9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	9
BAB III.....	54
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	54
BAB IV.....	59
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
BAB V .....	69
PENUTUP.....	69



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan, RENJA Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengelolaan Arsip, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dispersip Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 129 Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. penutup.

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;

- b. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Hulu Sungai Utara Tahun 2023–2026;
- c. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kecamatan;
- d. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Di dalam penyusunan RENJA 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengacu Kepada Review Rencana Pembangunan Daerah (R-RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dan Review RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026 dengan disesuaikan dengan bidang tugas dari Dispersip, dengan keterkaitan sasaran strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara :

**1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**

**2. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;**

## **I.2. Landasan Hukum**

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar dan landasan hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- 6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- 20)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- 21)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 22)Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 23)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
- 24)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
- 25)Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 26)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27)Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
- 28)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ...Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - ....
- 29)Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
- 30)Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

- 31) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
- 32) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ....Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor .....);

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Perpustakaan yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD Dinas Perpustakaan yang memuat kebijakan Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Sistematika Penyusunan Renja.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun lalu dan Capaian Renstra



SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Renja SKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya pada periode tahun keempat yakni tahun 2021 dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2022.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun program/ kegiatan utama tersebut adalah :

#### **A. Bidang Perpustakaan**

##### **1. Program Pembinaan Perpustakaan**

Dalam program diatas didukung beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;

Kegiatan ini didukung beberapa sub kegiatan, sebagai berikut:

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
- Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota;
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;

Kegiatan ini didukung sub kegiatan, sebagai berikut:

- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;

##### **2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Dalam program di atas didukung kegiatan sebagai berikut :

- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini didukung sub kegiatan :

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno

Adapun Pencapaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 (tahun ke 4 dari Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 4 indikator yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Indikator Kinerja Utama

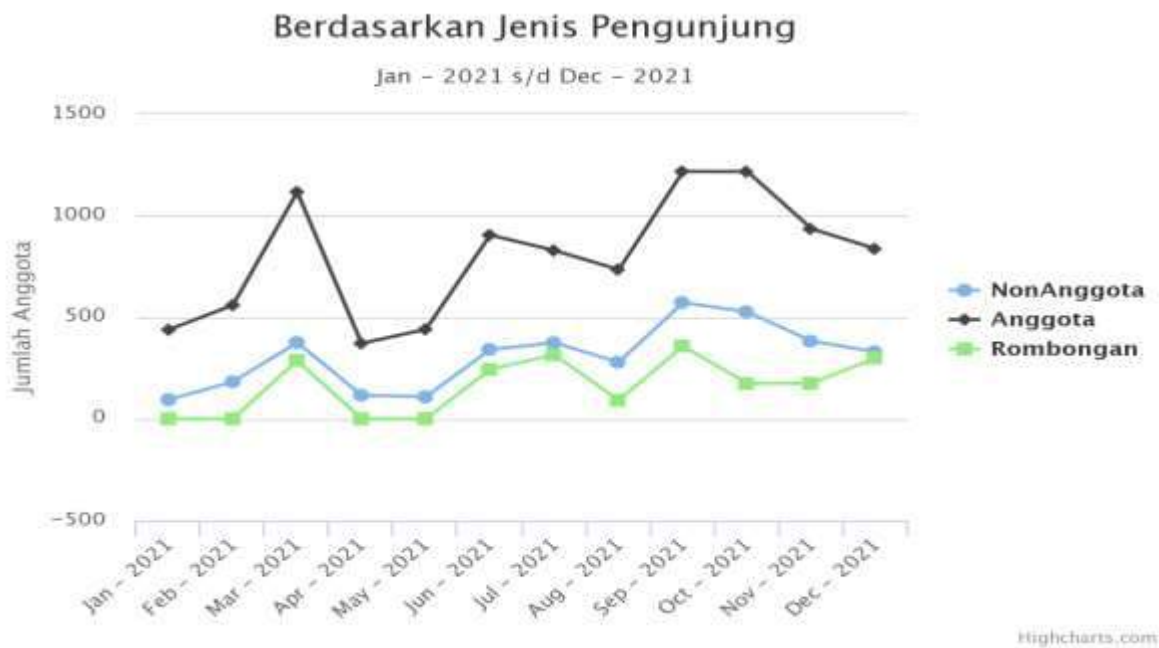
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Meningkatnya perbaikan system administrasi kearsipan di SKPD, Pemerintah Desa dan swasta	Persentase Jumlah SKPD, Pemerintah Desa dan Swasta yang menerapkan arsip secara baku	90 %	69,73%	77,47%
2	Meningkatnya SDM kearsipan yang mempunyai kompetensi di bidang kearsipan menuju tertibnya pengelolaan arsip pemerintahan dan swasta	Persentase Jumlah SDM Kearsipan yang menjalankan tugas-tugas kearsipan yang sesuai standaer	80%	69,73%	87,16%
3	Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan	32,5 %	14,54 %	44,73%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Nilai IKM 80	77,08	96,35%
4	Meningkatnya pengembangan semua jenis perpustakaan dan minat baca masyarakat	Persentase perpustakaan dibina sesuai NSPK	37,94 %	42,66%	112,4%
		Indeks minat baca masyarakat	Nilai IPLM 8,0	11,47	143,38%

Pada tabel indikator kinerja diatas, dapat dijelaskan sesuai dengan masing-masing sasaran strategis Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

jumlah persentase peningkatan kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan adalah 32,5 % terealisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 104,54%, untuk mendukung data tersebut dapat kami kemukakan melalui data bagan statistik perpustakaan sebagai berikut :

a. Jumlah pengunjung perpustakaan



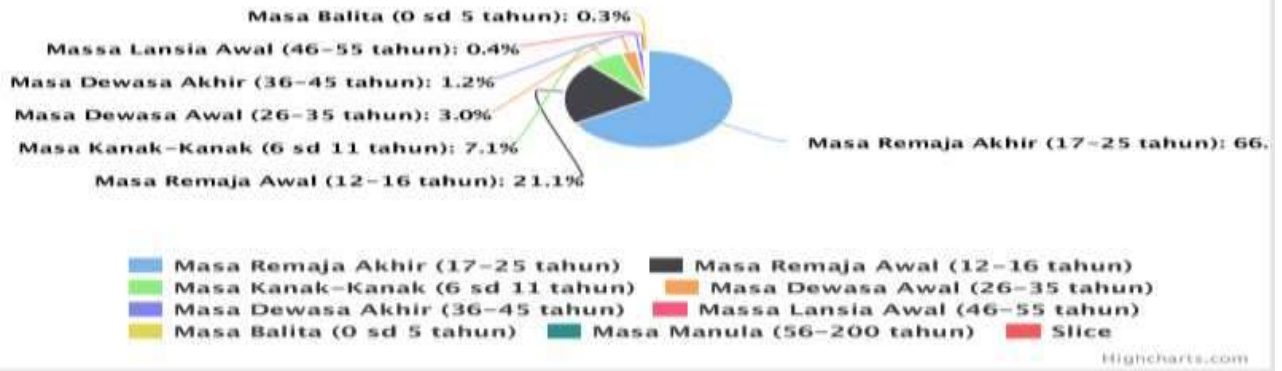
Pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah pengunjung tahun 2021 adalah 14.125 orang meliputi laki-laki 3.980 orang dan perempuan 10.145 orang.

Layanan Internet hotspot pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan layanan gratis bagi anggota perpustakaan. Pengguna layanan tersebut berjumlah 9.117 orang dengan rincian laki-laki 2.490 orang dan perempuan 6.627 orang.

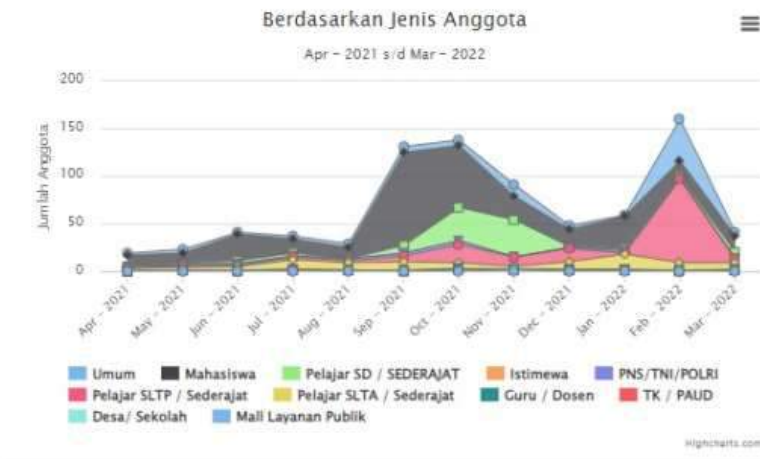
Layanan Perpustakaan Keliling dengan jumlah pengunjung 700 orang terdiri dari 280 orang laki-laki dan 420 orang perempuan.

Jumlah Perpustakaan Kecamatan & Desa sebanyak 67 buah perpustakaan desa, 2 perpustakaan kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 1 rumah pintar dengan pengunjung berjumlah 5.814 orang.

### Berdasarkan Kelompok Usia



b. Jumlah anggota perpustakaan



c. Jumlah anggota berdasarkan pendidikan

### Berdasarkan Pendidikan

Apr - 2021 s/d Mar - 2022



Anggota pada Perpustakaan Umum Daerah yang dapat mendapatkan layanan di perpustakaan umum maupun Perpustakaan Kelilingsampai dengan tahun 2021 berjumlah 8.548 orang. Laki-laki sebanyak 2.899 orang dan perempuan sebanyak 5.649 orang. Sedangkan anggota seluruh perpustakaan kecamatan dan desa pada tahun 2018 berjumlah 2.676 orang, 890 orang laki-laki dan 1.786 orang perempuan.

d. Jumlah koleksi



e. Jumlah koleksi berdasarkan klasifikasi buku



Jumlah keseluruhan Koleksi Perpustakaan sebanyak 20.613 judul, 37.903 eksemplar. Koleksi tersebut tersebar pada perpustakaan umum daerah dan perpustakaan keliling juga termasuk koleksi digital i-HSU di kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pengukuran terhadap jumlah koleksi bahan pustaka yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021. Kegiatan peningkatan keanekaragaman bahan pustaka sangat perlu dilakukan secara *continue*, hal tersebut dilakukan untuk mendukung masyarakat atas kebutuhan bahan literasinya secara *up to date*.

Berdasarkan Jumlah Koleksi diatas dapat diketahui pula bahwa realisasi pengembangan jumlah koleksi perpustakaan umum daerah dalam menunjang kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan tahun 2021 (tahun ke 4 Renstra) menunjukkan capaian kinerja peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dalam hal peningkatan jumlah koleksi perpustakaan sejumlah 570 eksemplar telah terealisasi atau tercapai sebanyak 626 eksemplar.



Untuk mencapai sasaran meningkatnya keanekaragaman bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan bahan Perpustakaan melakukan beberapa kegiatan pengolahan bahan pustaka terhadap Bahan Pustaka yang baru dan selanjutnya dapat dibaca dan dipinjam oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia informasi dan jembatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

f. Jumlah koleksi yang dipinjam



Buku yang dipinjam pada Perpustakaan Umum Daerah berjumlah 28.561 eksemplar, dan Perpustakaan Keliling berjumlah 7.458 eksemplar, sedangkan pada Perpustakaan kecamatan dan desa berjumlah 4.129 eksemplar dengan jenis dan judul buku yang bervariasi.

g. Berdasarkan koleksi dipinjam per klasifikasi



Jumlah peminjam pada perpustakaan umum daerah tahun 2021 adalah 27.462 orang, terdiri dari 6.392 laki-laki dan 21.070 orang perempuan.

Jumlah Peminjam pada layanan perpustakaan keliling yaitu sebanyak 3.874 orang. Laki-laki sebanyak 758 peminjam dan perempuan sebanyak 3.116

peminjam. Pada perpustakaan kecamatan & desa jumlah peminjam sebanyak 3.660 peminjam terdiri dari 1.275 orang laki-laki, dan 2.385 orang perempuan

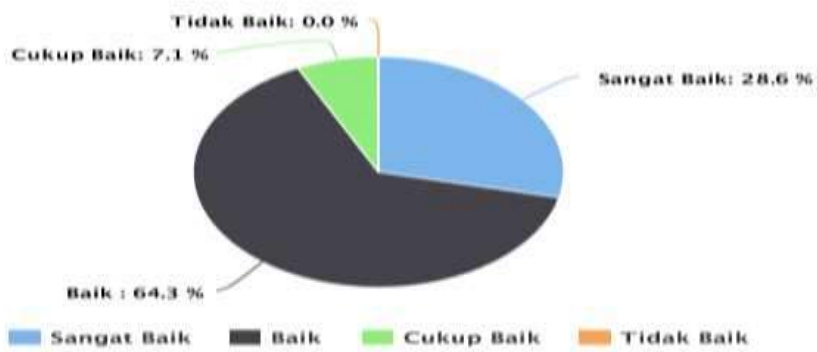
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan

Pada Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan, kami telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan umum daerah pada tahun 2021, survey dilaksanakan guna mengetahui seberapa puas dan apa saja yang belum terpenuhi baik kualitas layanan petugas, sarana layanan, kecepatan layanan perpustakaan dan berbagai aspek kegiatan layanan perpustakaan. Hasil kegiatan survey tersebut sebagai feedback bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memperbaiki kualitas layanan perpustakaan sebagai bentuk layanan public terhadap masyarakat langsung pengguna atau pemustaka yang dilayani, adapun hasil dari survey tersebut adalah dengan **nilai rata-rata 77,08 dengan kategori BAIK.**

Dalam pelaksanaan survey kami menggunakan system komputerisasi dengan aplikasi inlislite V3.1 yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI, target survey tersebut beberapa kategori pengunjung yang diambil sampel dalam pelaksanaan survey diantaranya masyarakat umum, mahasiswa, pelajar SMA dan pelajar SMP. Jumlah populasi yang disurvey adalah sebanyak 100 orang, Adapun persentase hasil survey minat baca sesuai dari data aplikasi adalah sebagai berikut:

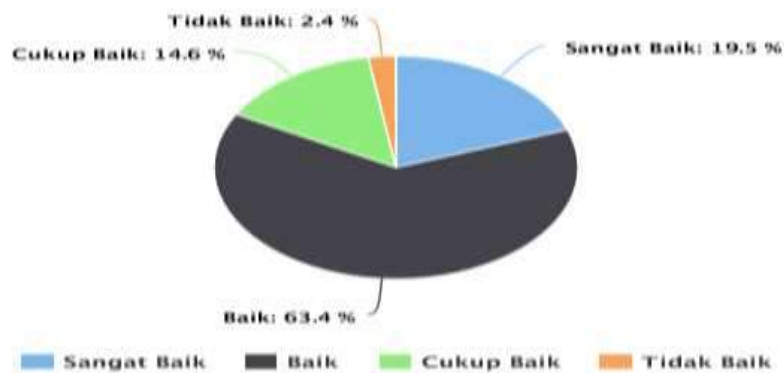


Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan pelayanan yang diberikan, apakah ada kemudahan dalam pengurusan Kartu Anggota ?



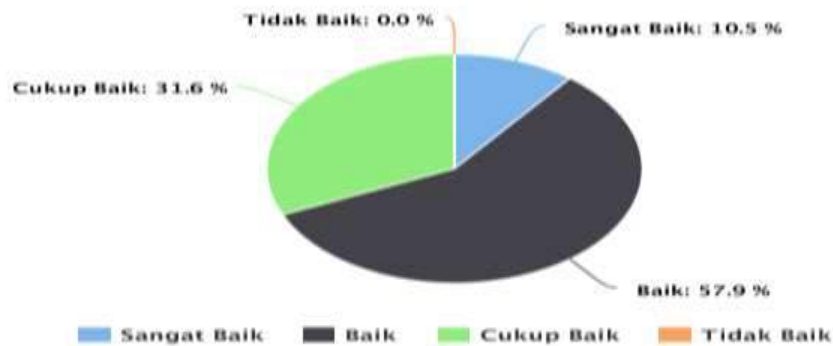
Highcharts.com

Bagaimana Pendapat saudara tentang keterbukaan petugas dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada anda ?



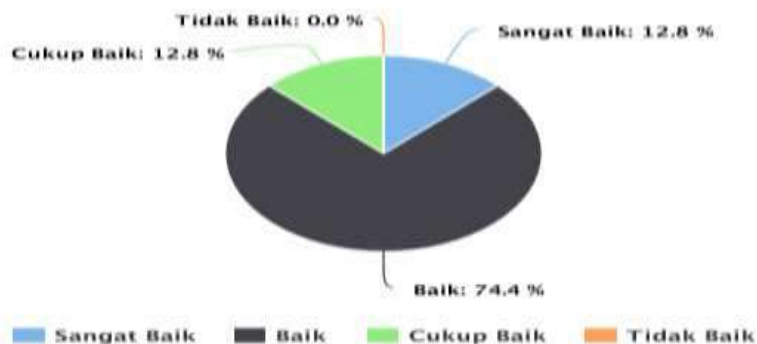
Highcharts.com

Bagaimana pendapat saudara tentang kesiapan dan kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada anda ?



Highcharts.com

Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab petugas pelayanan dalam menyelesaikan urusan kartu anggota anda ?



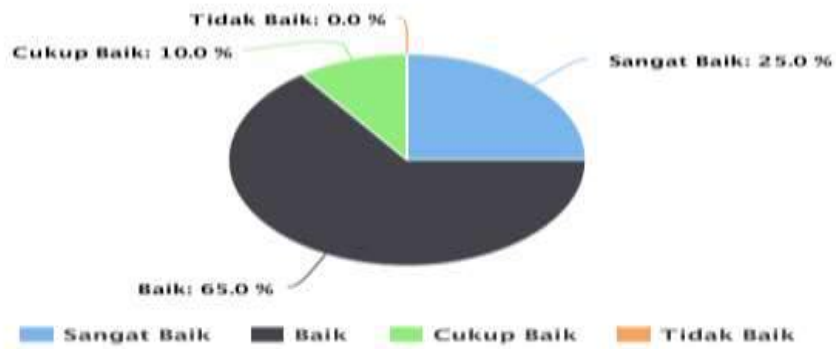
Highcharts.com

Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan dan kecakapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada anda ?



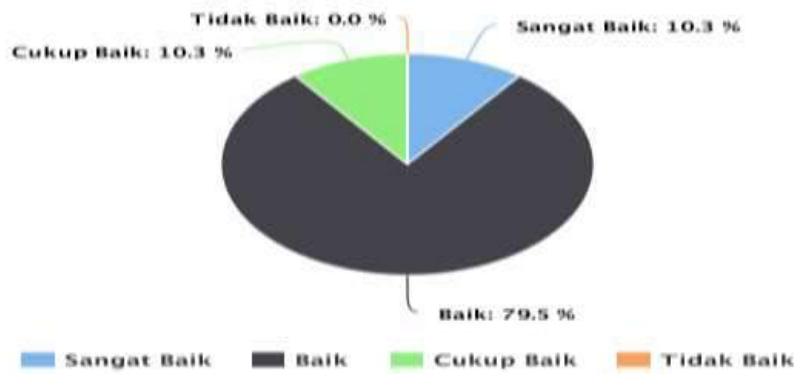
Highcharts.com

Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan dan ketepatan waktu dalam proses penyelesaian pelayanan kartu anggota anda ?



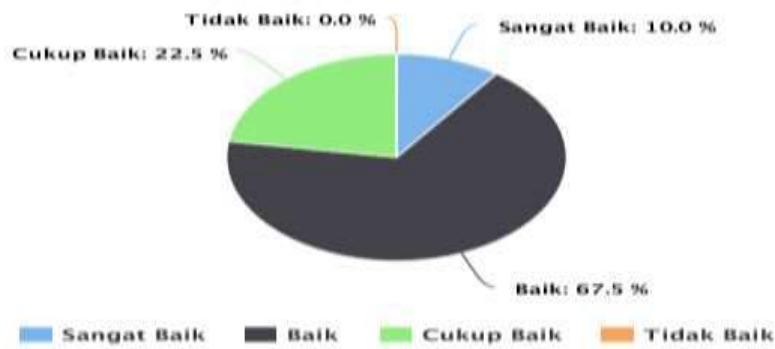
Highcharts.com

Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan dan kesamaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan ?

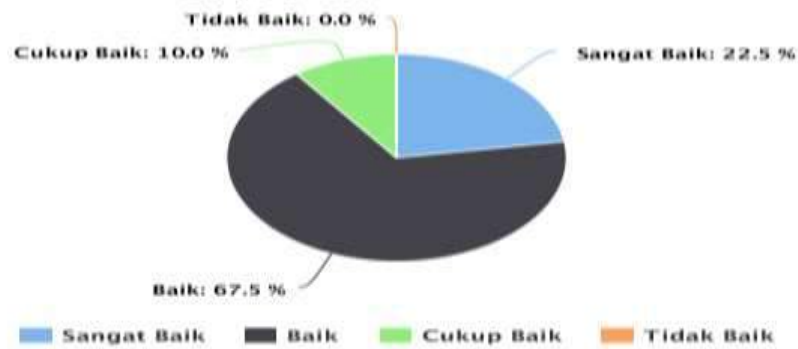


Highcharts.com

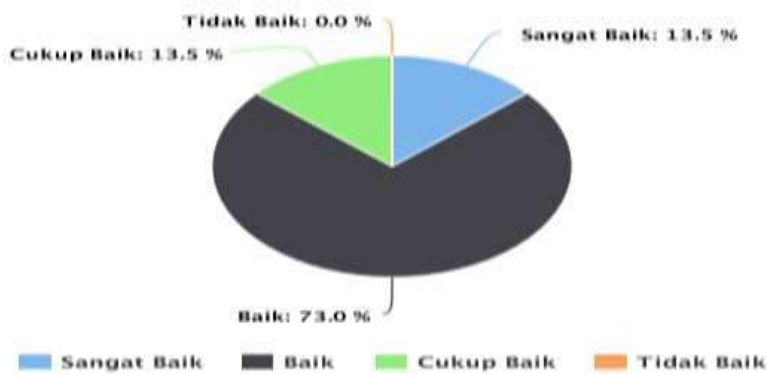
Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan, keramahan, sikap dan perilaku petugas kami dalam memberikan pelayanan kepada anda ?



Bagaimana pendapat saudara tentang kebersihan dan kenyamanan sarana dan prasarana lingkungan tempat pelayanan ?



Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan lingkungan tempat pelayanan ?



Dari data survey tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memberikan gambaran layanan public yang diberikan, sebagian besar dari 11 pertanyaan adalah baik, akan tetapi dimasa yang akan datang agar lebih baik dalam pemenuhan layanan perpustakaan.

Peningkatan dan pencapaian sasaran strategis dan memperluas jangkauan layanan perpustakaan ke seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan berbagai kegiatan penunjang lainnya yaitu;

- Kegiatan pengembangan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah dan berbagai layanan penunjang perpustakaan lainnya

diantaranya pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan perpustakaan, layanan bermain edukatif anak, layanan internet hotspot perpustakaan, layanan story telling, layanan perpustakaan keliling berbasis system komputerisasi, dan lain sebagainya, nantinya pengembangan Teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman dan berbasis kebutuhan masyarakat akan informasi yang diinginkan.

- Kegiatan lembur diluar jam kerja layanan perpustakaan umum daerah diluar jam kerja (pada hari jum'at siang dan sabtu) juga sangat berpengaruh dalam mendukung realisasi indikator kinerja utama bidang perpustakaan, karena perpustakaan umum daerah banyak dikunjungi pada hari libur tersebut.
- Kegiatan pendukung lainnya adanya kunjungan edukatif anak melalui kegiatan story telling kepada anak TK/PAUD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta kunjungan pelajar lainnya yang dilaksanakan.
- Adanya peran serta komunitas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai utara sangat berdampak signifikan guna mempromosikan layanan perpustakaan, pegiat literasi dan komunitas itu diantaranya Sekolah Guru Indonesia, adanya komunitas pustakawan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan berbagai event kegiatan yang dilaksanakan guna mendongkrak pupolaritas perpustakaan.
- Adanya kegiatan Amuntai Berdongeng yang dilaksanakan setiap tahunnya menjadikan promosi pembudayaan kegemaran membaca dan promosi perpustakaan lebih baik, karena menanamkan minat baca sejak usia dini sangat dibutuhkan guna mempersiapkan generasi yang berbudaya baca, apalagi sekarang mulai tahun 2018, tepatnya tanggal 5 mei 2018 Pemerintah telah mencanangkan budaya membacakan buku kepada anak melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

2. Sasaran strategis Meningkatnya pengembangan semua jenis perpustakaan dan minat baca masyarakat.

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan semua jenis perpustakaan dan minat baca masyarakat :

Tabel 2.2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN %	TAHUN 2021		CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	Persentase perpustakaan dibina sesuai NSPK	%	30,88	31,01	100,4	37,94%	42,66	112,4%
2.	Indeks Minat Baca	Nilai budaya baca	7,5	8,40	266,13	8,0	5,887	73,58%



Hasil atau sasaran yang ingin dicapai dari sasaran Meningkatnya pengembangan semua jenis perpustakaan dan minat baca masyarakat seluruh di kabupaten hulu sungai utara. Adapun indicator kinerja utama terbagi 2 (dua) yaitu :

**1. Persentase perpustakaan dibina sesuai NSPK**

Perpustakaan yang dibina sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah wewenang untuk pembinaan perpustakaan Kab/Kota meliputi perpustakaan sekolah SD/MI, SMP/MTs, perpustakaan kecamatan dan desa, perpustakaan SKPD/BUMD, perpustakaan khusus. Dari data yang dihimpun sebanyak 736 perpustakaan, maka rumusan yang digunakan adalah jumlah perpustakaan yang dibina dibagi jumlah keseluruhan perpustakaan sampai tahun 2021 adalah sebanyak 314 perpustakaan. **Maka capaian kinerja program sampai pada tahun 2021 adalah 42,66 % atau melebihi target rencana yang telah ditetapkan 112,4 %.** Ada rincian data perpustakaan yang dibina sesuai NSPK adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**DATA PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

- PERPUSTAKAAN SEKOLAH

<b>NO</b>	<b>JENIS PERPUSTAKAAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>YANG DIBINA</b>
1	SD	185	93
2	SMPN	30	30
3	MTSN	34	25
4	MIN/MIS	81	41
	<b>JUMLAH</b>	<b>330</b>	<b>189</b>

PERPUSTAKAAN KECAMATAN/DESA

<b>NO</b>	<b>JENIS PERPUSTAKAAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>YANG DIBINA</b>
1	DESA	214	86
2	PERCONTOHAN KECAMATAN	2	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>216</b>	<b>88</b>

PERPUSTAKAAN KHUSUS

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	TARGET	YANG DIBINA
1	MESJID	121	3
2	PONDOK PESANTREN	13	1
3	PERPUSTAKAAN SKPD	47	31
4	PERPUSTAKAAN BUMD/Forkopimda	9	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>190</b>	<b>22</b>

## 2. Indeks minat baca masyarakat

Pada indikator kinerja penghitungan indeks minat baca masyarakat yaitu cara penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM) yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional. Penghitungan indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2021 meliputi :

- a. Pemerataan layanan Perpustakaan
- b. Ketercukupan koleksi
- c. Ketercukupan tenaga perpustakaan
- d. Tingkat kunjungan masyarakat
- e. Jumlah perpustakaan ber SNP
- f. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan
- g. Anggota perpustakaan

Dalam penghitungan dengan rumusan Indeks pembangunan literasi masyarakat =  $\sum_{AM}^{UPLM} \times 100$ . Dari hasil penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

No	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan*
1	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	1,405   21,99%  0,0019  1,9%	<u>Jumlah Koleksi</u> : Jumlah penduduk 333.828 : 237.582 = 1,405  Jumlah Pengunjung Perpustakaan per hari : Jumlah Penduduk. 52.266 : 237.582 = 21,99%  Jumlah Tenaga Perpustakaan:Jumlah Penduduk 464:237.582 = 0,0019  Jumlah Perpustakaan yang ber-SNP : Jumlah Total Perpustakaan. 12 : 629 x 100% = 1,9%

		perpustakaan		
		5. jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	565	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialissi

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Keterangan*
1	Perpustakaan	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	<b>11,47</b>	<p><b>Indeks pembangunan literasi masyarakat</b> = <math>\sum_{AM}^{UPLM} X 100</math></p> <p><b>= 11,47</b></p> <p>Ket :</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan Perpustakaan = 0,00178</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan Koleksi = 0,561605</p> <p>UPLM 3 Ketercukupan Tenaga Perpustakaan = 0,001665</p> <p>UPLM 4 = Tingkat Kunjunga masyarakat/hari = 0,143940</p> <p>UPLM 5 = Jumlah Perpustakaan ber – SNP = 0,000105</p> <p>UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan = 0,004638</p> <p>UPLM 7 = Anggota Perpustakaan = 0,089337</p>

Sesuai dengan hasil yang telah dihitung dengan formulasi diatas, maka di dapat hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 adalah dengan **nilai 11,47**.

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 bidang pengembangan perpustakaan, meskipun adanya pandemic covid 19 yang melanda, akan tetapi berbagai kegiatan masih dapat dilaksanakan secara virtual maupun dengan pembatasan peserta sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai kegiatan pembatasan sosial yang dilaksanakan.

## B. Bidang Kearsipan

### 1. Program Pengelolaan Arsip

Dalam program ini didukung kegiatan, sebagai berikut :

- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini didukung sub kegiatan :

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
  - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis;
  - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota
- Kegiatan ini didukung sub kegiatan :
- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota
- Kegiatan ini didukung sub kegiatan :
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota.

## 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Dalam program ini didukung kegiatan, sebagai berikut :

- Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Kegiatan ini didukung sub kegiatan :
- Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun.

kinerja yang telah ditetapkan, adapun penjelasan pada masing-masing indikator kinerja IKU sebagai berikut :

### a. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku

Bidang kearsipan sebagai ujung tombak pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik dibidang kearsipan semaksimal mungkin melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kearsipan disetiap SKPD maupun ditingkat pemerintahan desa.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa besar SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemerintahan desa dalam menerapkan pengelolaan arsip secara baku yang sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku.

Selanjutnya untuk capaian sasaran pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Meningkatnya perbaikan system administrasi kearsipan di SKPD, pemerintahan desa dan swasta

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN %	TAHUN 2021		CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	Persentase jumlah SKPD,	%	90	56,32	62,22	90	69,73	77,47

pemerintah desa dan swasta yang menerapkan arsip secara baku								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel di atas memperlihatkan bahwa :

- ❖ Capaian kinerja sasaran meningkatnya SKPD, pemerintah desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja nyata sebesar 77,47% (47 SKPD dan ditambah desa yang menerapkan tata kearsipan sebanyak 135 desa) dari target persentase 90%, sehingga dapat dikategorikan **belum mencapai target yang telah dicanangkan.**
- ❖ Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung realisasi pembinaan dan pengawasan jumlah SKPD 47 dan 135 desa yang mengikuti sosialisasi arsip desa dibagi jumlah seluruh SKPD 47 ditambah jumlah seluruh desa sebanyak 214. dan yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 47 SKPD ditambah 135 desa diprosentasekan dengan capaian 77,47%.

Adapun kriteria SKPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku adalah :

1. Memiliki Pengelola Arsip
2. Memiliki sarana dan Prasarana Arsip sesuai standard an ketentuan yang berlaku.
3. Menerapkan manajemen kearsipan.

Untuk Pengawasan jumlah unit pengolah yang telah di awasi 47 SKPD dan 135 Desa telah selesai sesuai target, sehingga penerapan arsip di SKPD sudah sesuai standar, norma dan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku .

Daftar SKPD ( Unit Pengolah) yang di Audit tahun 2021 :

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa                                    | 23. BPP Dan Retribusi Daerah       |
| 2. Dinas Pendidikan  | 24. Inspektorat                    |
| 3. Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata                                 | 25. Kesbangpol                     |
| 4. Dinas Kesehatan   | 26. Satpol Pp Dan Damkar           |
| 5. Dinas Sosial  | 27. Sekretariat DPRD               |
| 6. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb                                    | 28. Kecamatan Amuntai Tengah       |
| 7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                               | 29. Kecamatan Amuntai Selatan      |
| 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak                    | 30. Kecamatan Amuntai Utara        |
| 9. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                      | 31. Kecamatan Banjar               |
| 10. Dinas Pertanian  | 32. Kecamatan Haur Gading          |
| 11. Dinas Perikanan  | 33. Kecamatan Babirik              |
| 12. Dinas Ketahanan Pangan   | 34. Kecamatan Sungai Pandan        |
| 13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja | 35. Kecamatan Sungai Tabukan       |
| 14. Dina Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah   | 36. Kecamatan Danau Panggang       |
| 15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup              | 37. Kecamatan Paminggir            |
| 16. Dinas Pu, Penataan Ruang Dan Pertanahan                              | 38. Bag. Pemerintahan              |
| 17. Dinas Perhubungan  | 39. Bag. Kesejahteraan Rakyat      |
| 18. Dinas Komunikasi Dan Informatika                                     | 40. Bag. Humas Dan Protokol        |
| 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                  | 41. Bag. Perekonomian Dan SDA      |
|  | 42. Bag. Pembangunan               |
|  | 43. Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa |
|  | 44. Bag. Hukum                     |
|  | 45. Bag. Organisasi                |

20. Bapaletbang  
21. BKPP  
22. BPKAD

46. Bag. Umum  
47. RSUD Pembalah Batung

Untuk Desa yang telah dilakukan pembinaan di 135 Desa dengan sasaran seluruh Aparat Desa, yang terdiri dari :

No.	Nama Kec./ Desa	No.	Nama Kec./ Desa
1.	Kecamatan Sungai Pandan	2.	Kecamatan Amuntai Utara
1	Desa Tatah Laban	1	Desa Tabalong Mati
2	Desa Rantau Karau Hulu	2	Desa Pakapuran
3	Desa Banyu Tajun Hilir	3	Desa Pamintangan
4	Desa Rantau Karau Raya	4	Desa Panangkalaan Hulu
5	Desa Sungai Pandan Tengah	5	Desa Padang Besar Hilir
6	Desa Sungai Sandung	6	Desa Padang Besar Hulu
7	Desa Sungai Pinang	7	Desa Sungai Turak
8	Desa Teluk Betung	8	Desa Murung Karang
9	Desa Pandulangan	9	Desa Teluk Daun
10	Desa Banyu Tajun Dalam	10	Desa Pakacangan
11	Desa Pangkalan Sari	11	Desa Telaga Bamban
12	Desa Jalan Lurus	12	Desa Tebing Lering
13	Desa Murung Asam	13	Desa Kamayahan
14	Desa Sungai Kuini	14	Desa Cakru
15	Desa Pandulangan	15	Desa Guntung
3.	Kecamatan Haur Gading	4.	Kecamatan Amuntai Selatan
1	Desa Sungai Binuang	1	Desa Panyiuran
2	Desa Pihaung	2	Desa Simpang Empat
3	Desa haur Gading	3	Desa Rukan Hilir
4	Desa Jingah Bujur	4	Desa Kutai
5	Desa Palimbangan Sari	5	Desa Murung Sari
6	Desa Bayur	6	Desa mamar
7	Desa Sungai Limas	7	Desa Teluk Paring
8	Desa Palimbangan	8	Desa Rukam Hulu
9	Desa Bayur	9	Desa Cangkering
10	Desa Lok soga	10	Desa Jumba
11	Desa Tangkawang	11	Desa Ilir Mesjid
12	Desa palimbangan Gusti	12	Desa Jarang Kuantan
13	Desa Keramat	13	Desa Telaga Hanyar
14	Desa Panawakan	14	Desa Telaga Sari
15	Desa Pulan Tani	15	Desa Telaga Silaba
5.	Kecamatan Banjang	6.	Kecamatan Paminggir
1	Desa Pulau Damar	1	Desa Sapala
2	Desa Banjang	2	Desa Bararawa
3	Desa Beringin	3	Desa Paminggir
4	Desa Pawalutan	4	Desa Tampakang
5	Desa Kaludan Besar	5	Desa Pal Batu
6	Desa Kaludan Kecil	6	Desa Ambahai
7	Desa Lok Bangkai	7	Desa Paminggir Seberang
8	Desa Patarikan		
9	Desa Garunggang		
10	Desa Teluk Buluh		
11	Desa Teluk Serikat		
12	Desa Sungai Bahadangan		
13	Desa Pelanjungan Sari		
7.	Kecamatan Amuntai Tengah	8.	Kecamatan Babirik
1	Desa Tambalangan	1	Desa Sungai Durait Hulu
2	Desa Kembang Kuning	2	Desa Sungai Durait Hilir
3	Desa Pasar Senin	3	Desa Babirik Hulu



- 4 Desa Rantawan
- 5 Desa Tapus
- 6 Desa Kandang Halang
- 7 Desa Muara Tapus
- 8 Desa Datu Kuning
- 9 Desa Kota Raden Hulu
- 10 Desa Kota Raden Hilir
- 11 Desa Hulu Pasar
- 12 Desa Sungai Karias
- 13 Desa Harus
- 14 Desa Sungai Baring
- 15 Desa Pinang Habang

- 4 Desa Babirik Hilir
- 5 Desa Hambuku Hilir
- 6 Desa Sungai Dalam
- 7 Desa Sungai Zam-Zam
- 8 Desa Sungai Durait Tengah
- 9 Desa Teluk Limbung
- 10 Desa Sungai papuyu
- 11 Desa Sungai Nyiur
- 12 Desa Sungai Luang Hilir
- 13 Desa Sungai Luang Hulu
- 14 Desa Murung Panti Hulu
- 15 Desa Murung Panti Hilir

9. Kecamatan Danau Panggang

- 1 Desa Manarap
- 2 Desa Bitin
- 3 Desa Teluk Mesjid
- 4 Desa Palukahan
- 5 Desa Darussalam
- 6 Desa Pandamaan
- 7 Desa Rintisan
- 8 Desa Teluk Mesjid
- 9 Desa Sungai Namang
- 10 Desa Sungai Panangah
- 11 Desa Sarang Burung
- 12 Desa Longkong
- 13 Desa Telaga Mas
- 14 Desa Pararain
- 15 Desa Baru

10. Kecamatan Sungai Tabukan

- 1 Desa Pematang Benteng
- 2 Desa Pematang benteng Hilir
- 3 Desa Sungai Tabukan
- 4 Desa Nelayan
- 5 Desa Pasar Sabtu
- 6 Desa Sungai Haji
- 7 Desa Galagah
- 8 Desa Gampa Raya
- 9 Desa Banua Hanyar
- 10 Desa Teluk Cati
- 11 Desa Galagah Hulu
- 12 Desa Tambalangan Raya
- 13 Desa Rantau Bujur Darat
- 14 Desa Rantau Bujur Hulu
- 15 Desa Rantau Bujur Hilir

**b. Meningkatnya SDM kearsipan yang mempunyai kompetensi dibidang kearsipan menuju tertibnya pengelolaan arsip pemerintahan dan swasta**

Tabel 2.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya SDM kearsipan yang mempunyai kompetensi dibidang kearsipan menuju tertibnya pengelolaan arsip pemerintahan dan swasta

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN %	TAHUN 2021		CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	Persentase jumlah SDM kearsipan yang menjalankan tugas-tugas kearsipan sesuai standar	%	80	100	125	80	69,73	87,16

Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan arsip, khususnya untuk penataan surat masuk dan surat keluar, untuk dinilai seluruh aparat telah mampu menjalankan aturan dalam standar kearsipan sesuai dengan :

- 1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
- 3) Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- 4) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan
- 5) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Buku Pedoman Tata Kearsipan
- 6) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip
- 7) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Buku Tata Naskah Dinas
- 8) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
- 9) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

Tabel 2.7

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome)/ Kegiatan ( Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra SKPD) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/ d Tahun 2020 ( Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 ( Tahun lalu /n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian targer Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 ( Tahun berjalan/ n-1)		Catatan
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)*	12
1											
1	23										
2	23	1									
2	23	1	2,0								
2	23	1	2,0	6							
2	23	1	2,0	7							

2	23	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	200 %	100 %	100%	100	1	100 %	300	3	
2	23	1	2.0 2	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayar	46 org	100 %	14 bulan	14 Bulan	1	100 %	300	3	
2	23	1	2.0 5		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi	200 %	80 %	100%	0 %	0	80 %	240	3	
2	23	1	2.0 5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase ASN yang dapat mengikuti diklat formal	4 org	100 %	100%	0 %	0	100	300	3	
2	23	1	2.0 6		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	200%	11 unit	100%	62 %	0,62	12 buah	35	2,91	
2	23	1	2.0 6	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Barang yang akan dibeli	40 jenis	0	35 Jenis	29 Jenis	0,83	0	0	0	
2	23	1	2.0 6	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jasa dan peralatan kebersihan yang terealisasi	30 Jenis	25 %	32 Jenis	32 Jenis	15 Jenis	0,47	100 %	225	2,25
2	23	1	2.0 6	4	Penyediaan bahan logistic kantor	Jenis barang yang dibutuhkan	158 jenis	25 %	76 Jenis	46 jenis	0,61	100 %	150	1,5	
2	23	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	40 Kali	100 %	20 kali perjalanan	11 Kali	1	100	300	3	
2	23	1	2.0 8		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah	200%	100 %	100%	100 %	1	100 %	300	3	

2	23	1	2,08	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan yang harus dibayar	200%	21,64 %	8 langganan	8 Langganan	1	23,83 %	56,72	12,63	
2	23	1	2,09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpeliharanya barang milik daerah	200%	80%	100*%	100 %	1	80%	80	1	
2	23	1	2,09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	24 buah	90 %	12 buah	12 Buah	1	90 %	270	3	
2	23	1	2,09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya gedung kantor	80%	80%	100 %	100 %	1	60 %	140	1,75	
2	23	2			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan	67,5 %	45 Perpu stakaan	32,5%	14,54 %	44,7	70	182	2,27	
2	23	2	2,01		Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	3,10%	80 %	1,60 %	2,05 %	1,28	90 %	260	2,88	
2	23	2	2,01	1	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah kunjungan masyarakat yang mengakses perpustakaan digital	15.000	0	1 paket	1 pake t	1	60	60	0,8	
2	23	2	2,01	2	Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan daerah	100.000		60.000 kunjungan	29.966 Kunj ungan	0,49				
2	23	2	2,0	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat	Jumlah Peningkatan	1.000	23,89 %	1.000 eksemplar	1.000 Ekse mpla r	1	27,5	73,67	2,10	

			1		Daerah Kabupaten/ Kota	Bahan Perpustakaan										
2	23	2	2,0 1	4	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standard nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan tingkat Dasar yang dibina sesuai Standar Nasional perpustakaan	<b>50 perpustakaan</b>	50.074	90%	13%	0,14	55.000	156.613	2,23		
2	23	2	2,0 1	5	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina sesuai standar Nasional	<b>20 Perpustakaan</b>	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	1	1000 eks	2146	0,52	
2	23	2	2,0 1	6	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang menerapkan bimtek	<b>100 peserta</b>	13 titik layanan	80%	80%	1	15 lokasi layanan	40	1,73		
2	23	2	2,0 1	7	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah titik lokasi layanan perpustakaan keliling	<b>53 titik lokasi</b>	3.771	17 titik lokasi	12 titik lokasi	0.7	7.500	16.124	1.07		
2	23	2	2,0 1	10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Jenis Dokumen Profil Perpustakaan	<b>6 Dokumen</b>	600 eks	80%	80%	1	1000 eks	2200	1.46		
2	23	2	2,0 2		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)	<b>16,90</b>	90 %	8,5	11,47	1,3	70	250	2.77		
2	23	2	2,0 2	1	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	<b>4 kegiatan</b>	0	1.000 Peserta	565 peserta	0,56	80 %	80	1		
2	23	2	2,0 2	3	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah lomba gerakan budaya gemar membaca	<b>4 kegiatan</b>	0	5 kegiatan	2 Kegiatan	0,4	1 paket	1	0		



2	23	2	2.0 2	4	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Literasi berbasis Inklusi Sosial	8 kegiatan	0	80%	80 %	1	0	0	0
2	23	2	2.0 2	5	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta lomba pemilihan duta baca	100 peserta	0	90%	45 %	0,5	0	0	0
2	23	3			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Naskah Kuno yang diperbaiki</b>	5 naskah	0	5 naskah	0	0	0	0	0
2	23	3	2.0 1		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Buku/ Naskah koleksi daerah yang terselamatkan	5 Naskah	0	5 naskah	0	0	0	0	0
2	23	3	2.0 1	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Koleksi yang diperbaiki dan pelestarian naskah kuno	25 %	25 %	1250 eksemplar	1.250 Eksemplar	1	20 %	65	2,6
2	24	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional</b>	50%	25%	25%	25%	1	25 %	75	3
2	24	2	2.0 1		Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Persentase Arsip dinamis aktif dan Inaktif di SKPD dan Pemerintahan	20 buah	20 buah	22%	0	0	0	20	1
2	24	2	2.0 1	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Sosialisasi Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis bagi Pengelola Arsip di SKPD dan	25 %	25%	50 peserta	50 Peserta	1	25 %	75	3

						Pemerintah Desa											
2	24	2	2.0 1	2	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara	2.000 Berkas	20%	50 SKPD	50 SKPD	1	20 %	65	2,6			
2	24	2	2.0 1	3	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	Jumlah Pengawasan Arsip dinamis SKPD melalui audit internal kearsipan	94 SKPD	25%	47 SKPD	47 SKPD	1	25 %	75	3			
2	24	2	2.0 2		Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persentase Dokumen Arsip Statis/ Sejarah	40 buah	20%	100%	100 %	1	20	60	3			
2	24	2	2.0 2	2	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Dokumen arsip daerah yang terselamatkan	40 buah	80%	25 buah	25 buah	1	80%	240	3			
2	24	2	2.0 3		Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Jumlah Tersedianya Informasi dan Layanan Kearsipan	522 SKPD/desa	80%	100%	100 %	1	80 %	240	3			
2	24	02	2.0 3	0 1	Pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Tersedianya Informasi dan Layanan Kearsipan di SKPD	428 Desa		50 Desa	50 Desa	1						
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah unit kearsipan/ lembaga kearsipan yang diberdayakan	94 SKPD		100%	325 %	3,25						
2	24	3	2.0 1		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terselamatkannya Dokumen Arsip/ Sejarah			100%	325 %	3,25						
2	24	2	2.0 1	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10	Dokumen arsip daerah yang terselamatkan			1.000 berkas	3.250 Berkas	3,25						

					(sepuluh) tahun														
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.8

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
					2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	10	11	15	16
	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>							
17	<b>Perpustakaan</b>							
	1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan			77.500	85.000	13.567	0
	2	Koleksi Buku yang tersedia diperpustakaan daerah			29.264	31.264	37.903	0
	3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk			3.450	3.500	3.176	0
	4	jumlah rata rata pengunjung perpustakaan/tahun			6.458	7.083	1.131	0
	5	jumlah koleksi judul buku perpustakaan			13.811	14.477	19.547	0
	6	jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat			25	25	25	0
18	<b>Kearsipan</b>							
	1	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku			76%	100%	47,1%	0
	2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan			80%	100%	47,1%	0

### 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertanggung jawab dalam Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sehingga harus berupaya mengoptimalkan kinerja organisasi antara lain:

1. Sarana dan prasarana pengembangan perpustakaan, agar pemustaka pada semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat merasa nyaman, dan aksesibilitas ke perpustakaan benar-benar terakomodir kepada seluruh lapisan masyarakat HSU
2. Kualitas SDM aparatur perpustakaan dan kearsipan sebagai wujud pengembangan kualitas SDM aparatur/pegawai.
3. Budaya Gemar Membaca dan pengembangan semua jenis perpustakaan agar dapat dioptimalkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca sehingga membaca menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya gemar membaca masyarakat, masih belum optimalnya promosi, publikasi dan pasyarakatatan perpustakaan masih jauh dengan kata sempurna, karena belum adanya gebrakan yang signifikan dalam kegiatan-kegiatan promosi dan publikasi perpustakaan.

5. Kualitas dan kapasitas Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat yang ditandai oleh meningkatkan standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM disemua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Intensitas dan diverifikasi layanan semua karya tulis berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya layanan perpustakaan yang berbasis system komputerisasi perpustakaan.
7. Semua karya tulis, karya cetak, dan cetak rekam hasil karya intelektual masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditandai oleh meningkatkan koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka.
8. Penguatan koleksi perpustakaan umum, perpustakaan keliling, perpustakaan kecamatan maupun perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Terbitnya Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kearsipan.
10. Pengelola kearsipan di SKPD sangat mutlak harus ada sebagai pengganti ketidakadaan arsiparis.
11. Dokumen/Arsip adalah rekaman kegiatan pemerintahan yang dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan, sehingga memungkinkan arsip harus dikelola dengan baik dan benar sebagai alat pertanggung jawaban kinerja tiap organisasi.
12. Pembinaan dan pengelolaan arsip mutlak harus dilakukan oleh setiap Instansi pemerintah dari kabupaten sampai ketingkat desa, hal ini di karenakan setiap kegiatan yang menggunakan beban APBD harus dipertanggung jawabkan dengan dokumen/arsip yang menjadi bukti dari segala kegiatan pemerintah yang dijalankan.
13. Arsip adalah bukti akuntabilitas kinerja dari suatu organisasi, apabila arsip dikelola dan ditata dengan baik dan benar maka bisa dipatikan bahwa SKPD tersebut telah menyiapkan pertanggung jawaban kinerja SKPDnya dalam suatu pembuktian yang sah yaitu arsip.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD bidang perpustakaan dan Kearsipan adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya perpustakaan dan Masih rendahnya minat baca masyarakat.
2. Masih terbatasnya pengembangan koleksi digital dan sarana prasarana untuk menunjang pengembangan perpustakaan berbasis digital seperti aplikasi perpustakaan digital, koleksi digital dan lebih penting sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan layanan perpustakaan digital.
3. Sarana layanan internet harus segera diperbaharui karena akses internet diperpustakaan sudah sangat lambat dan jumlah pemakai layanan ini sangat

banyak dalam setiap harinya, perlu perhatian khusus dalam kegiatan ini agar kinerja perpustakaan dapat tercapai dengan maksimal.

4. Belum optimalnya kinerja Sistem komputerisasi layanan perpustakaan umum daerah, sehingga sering terjadi kerusakan pada sistem yang ada.
5. Masih kurangnya koleksi / bahan pustaka yang dimiliki atau belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional untuk Kabupaten/Kota maupun koleksi untuk perpustakaan kecamatan dan desa
6. Masih terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan, Sarana prasarana penunjang perpustakaan belum maksimal.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional bidang Perpustakaan :

1. Minat Baca Masyarakat yang semakin meningkat;
2. Layanan Perpustakaan menjangkau ke kecamatan-kecamatan dan desa;
3. Meningkatnya SDM Kearsipan dalam pengelolaan arsip;
4. Arsip-arsip di beberapa SKPD terkelola dengan baik;
5. Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya penyelamatan dan penataan arsip dengan baik.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

a. Tantangan

- Memperkuat dan memperluas jangkauan layanan perpustakaan terhadap masyarakat.
- Penguatan koleksi perpustakaan baik koleksi tercetak maupun koleksi digital.
- Meningkatkan Kompetensi keahlian SDM pengelola perpustakaan baik perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah.
- Penguatan minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Merubah pradigma dan kesadaran setiap SKPD tentang pentingnya arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja masing-masing SKPD
- Menambah anggaran kearsipan secara lebih baik untuk menambah sarana prasarana kearsipan yang representatif
- Menggugah kesadaran setiap kepala desa untuk mengelola arsip desa dengan baik dengan kegiatan arsip masuk desa
- Menggugah kesadaran masyarakat untuk menyerahkan khazanah arsip statis kepada pemerintah daerah agar dapat diakses oleh pengguna arsip baik sebagai sumber penelitian maupun sebagai bahan pembelajaran.

b. Peluang.

- Adanya keinginan masyarakat dan berbagai lembaga dalam mendirikan perpustakaan di masing-masing tingkatan level pemerintahan, ini sebuah pertanda perpustakaan harus dapat bersinergi dengan semua pemangku kegiatan dalam pengembangan perpustakaan.
- Gedung Perpustakaan dengan fasilitas ruang baca yang representatif disertai dengan ruang edukasi/ bermain anak.
- Program-program pemerintah dalam melaksanakan Bimbingan teknis untuk pengelola Perpustakaan dan pustakawan.
- Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang dijadikan sebagai payung hukum penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum masyarakat
- Adanya depo arsip yang cukup representatif untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kearsipan

#### Formulasi isu-isu penting

Adapun Rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti dalam rangka penguatan pengembangan perpustakaan dan kelembagaan kearsipan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**RANCANGAN MATRIK RKPD 2023**  
**PERMASALAHAN DAN SOLUSI DINAS PERPUSTAKAAN KAB. HSU**

NO	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			Permasalahan Pembangunan Daerah	SOLUSI
1				3	4
	<b>17.</b>	<b>Perpustakaan</b>			
	1		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	<p>Rendahnya Minat baca masyarakat masih menjadi perhatian khusus, apalagi sekarang banyaknya media informasi dan dunia digital lainnya yang menjadi salah satu faktor rendahnya minat baca.</p> <p>Pandemi Covid 19 membuat intensitas jam layanan perpustakaan, sehingga menurunnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p>	<p>Optimalisasi pengembangan layanan perpustakaan dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya penambahan jam layanan perpustakaan, pengembangan layanan perpustakaan digital, penambahan kapasitas akses jaringan internet pemustaka dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan serta mendorong kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di perpustakaan umum daerah.</p> <p>Menerapkan jam layanan perpustakaan sesuai aturan protokol kesehatan dan lebih mengoptimalkan layanan perpustakaan digital sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan melalui layanan perpustakaan digital</p>
	2		Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	<p>Penguatan Koleksi Perpustakaan masih perlu ditingkatkan, meskipun sekarang sudah memenuhi target minimal sesuai standar nasional perpustakaan kabupaten/kota, akan tetapi penguatan koleksi harus terus ditingkatkan agar pemenuhan bahan pustaka masyarakat terus berkembang sesuai dengan</p>	<p>Pengembangan koleksi melalui berbagai kegiatan terus di upayakan, baik penambahan koleksi melalui pendanaan APBD maupun APBN (DAK) subbidang perpustakaan, dan juga berusaha untuk mendapatkan melalui hibah bantuan lainnya</p>



				perkembangan teknologi informasi, oleh karena itu penguatan koleksi digital agar lebih di optimalkan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat yang melek literasi digital.	
		3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Belum optimalnya pembinaan pengembangan perpustakaan, dan pertumbuhan perpustakaan desa/kecamatan yang ada, serta minimnya kesadaran para pemangku kepentingan dalam menciptakan perpustakaan sesuai standar yang berlaku (SNP)	Koordinasi dan memberikan penguatan kelembagaan perpustakaan Kec/Desa, sekolah dan perpustakaan khusus agar dapat terlaksana dengan optimal sebagai wadah masyarakat dalam meningkatkan budaya literasi serta penguatan dan replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
		4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	masih minimnya kegiatan sosialisasi dan promosi pembudayaan kegemaran membaca, pemberdayaan dan pemanfaatan perpustakaan kepada khalayak masyarakat melalui berbagai media	Terus meningkatkan promosi, sosialisasi tentang keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan, serta menggalakkan pembudayaan kegemaran membaca dikalangan masyarakat. Juga mendorong para pegiat dan komunitas literasi untuk menciptakan berbagai kegiatan inovasi dalam dunia kepustakaan.
		5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan koleksi perpustakaan yang memiliki nilai sejarah dan budaya sehingga penyelamatan dan pelestarian koleksi lokal konten belum optimal.	Perlunya mendorong para penulis lokal dalam menyerahkan karya cetak dan karya rekam mereka ke perpustakaan agar dapat didayagunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
		6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Masih minimnya tenaga fungsional pustakawan yang ada di sekolah dan tenaga perpustakaan yang ada di perpustakaan desa	Perlunya penambahan tenaga pustakawan disekolah-sekolah, dan pemerintah desa diharapkan dapat mengalokasikan penganggaran untuk pengelola perpustakaan desa, serta melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan

	18.	Kearsipan			
		1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	masih belum tersedianya anggaran pengelolaan kearsipan disetiap SKPD dalam menunjang tersedianya arsip yang autentik sebagai akuntabilitas kinerja.	agar semua SKPD dapat mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan arsip
				penerapan aplikasi Srikandi, SIKN dan JIKN perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan SPBE di Hulu Sungai Utara	masih diperlukan adanya Bimtek khusus pengelola arsip SKPD dalam penerapan Srikandi
				belum adanya kebijakan pimpinan SKPD tentang alih media dan reproduksi arsip	SKPD harus membuat kebijakan khusus tentang alih media dan reproduksi arsip
				Belum maksimalnya penyerahan arsip statis di SKPD ke Lembaga Kearsipan Daerah	adanya aturan dan kebijakan khusus tentang serah simpan arsip statis
				Belum maksimalnya akusisi arsip disetiap SKPD	Pemerintah Daerah wajib membuat regulasi kebijakan tentang akusisi arsip SKPD
				Masih adanya pemerintah desa yang belum memiliki anggaran dan sarana/prasarana kearsipan	Tiap pemerintah desa wajib menyediakan anggaran pengelolaan kearsipan desa
				Hasil Audit pengawasan kearsipan belum sepenuhnya ditindak lanjuti ditiap SKPD	perlu adanya pemahaman pimpinan SKPD terhadap hasil audit kearsipan
				sarana dan prasarana kearsipan yang belum memenuhi standar khususnya lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip agar dapat ditingkatkan sesuai standar kearsipan
		2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	rendahnya sumberdaya aparatur kearsipan baik di SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki kompetensi	Perlunya penambahan SDM fungsional kearsipan, pelaksanaan peningkatan Bimtek kearsipan dan berbagai kegiatan dalam menciptakan SDM arsip yang berkompetensi

### **2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKP**

1. Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, Dinas Perpustakaan merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.
2. Pada Prioritas peningkatan implementasi good governance, dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, Dinas Perpustakaan merencanakan Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota dan program pengelolaan arsip.
3. Pada Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, dengan sasaran Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, direncanakan Program Pembinaan perpustakaan dan program pelestarian naskah kuno, dengan adanya dua program tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
4. Sesuai program nasional bidang perpustakaan, ada beberapa perubahan dengan kebijakan nasional yaitu tentang pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social, diharapkan nantinya semua perpustakaan yang ada di Indonesia dapat menerapkan program tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat, maka oleh karena itu perlunya kegiatan dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut kegiatan perpustakaan dalam mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui perpustakaan dapat terwujud dengan baik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Tabel 2.10

Tabel Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.131.388.3 50</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.131.388.350</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	7.125.000,-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	7.125.000,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.575.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.575.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	1.875.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	1.875.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.275.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	91,10%	2.674.424.850	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	91,10%	2.674.424.850	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.673.434.850	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.673.434.850	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporam	990.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporam	990.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	100%	0	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. HSU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	100%	67.297.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	100%	67.297.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.5600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.5600.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.440.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.440.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.297.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.297.500	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	30.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase Barang yang dibeli	100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase Barang yang dibeli	100%	0	
	Pengadaan Mebel	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 uni	0	Pengadaan Mebel	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 uni	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	328.975.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	328.975.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	114.175.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	114.175.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	214.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	214.800.000	

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	100%	52.966.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perpustakaan Kab. HSU	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	100%	52.966.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	23.266.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	23.266.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	19.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	19.200.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	5.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	5.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	5.250.000	Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	5.250.000	



II	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00	195.000.000	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00	195.000.000	
			Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	12,70				Nilai Survey Tingkat Kegemaran Membaca	12,70		
8	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8,0	135.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8,0	135.000.000	
	Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	9.747.000	Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	58.647.000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	15.202.875	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	15.202.875	

	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	67.500.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	77.556.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	260 eksemplar	37.500.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	260 eksemplar	37.500.000	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	5.050.125	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	5.050.125	
9	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan		60.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan		60.000.000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 perpustakaan	60.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 perpustakaan	60.000.000	

III	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan  Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	1 naskah 362 judul	5.000.000	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan  Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)	1 naskah 362 judul	5.000.000	
10	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	362 judul	5.000.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	362 judul	5.000.000	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	38 eksemplar	5.000.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	38 eksemplar	5.000.000	
IV	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Persentasi tingkat ketersediaan Arsip	90,50%	225.000.000						
11	Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU			85.000.000,-						
	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 berkas	30.000.000,-	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	50 berkas	30.000.000,-	

	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 laporan	55.000.000,-	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 laporan	55.000.000,-	
12	Pengelolaan arsip statis daerah	Dinas Perpustakaan Kab. HSU			60.000.000,-						
	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	30 arsip	30.000.000,-	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	30 arsip	30.000.000,-	
	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 arsip	30.000.000,-	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25 arsip	30.000.000,-	
13	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten	Dinas Perpustakaan Kab. HSU			80.000.000,-						
	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 pengguna	30.000.000,-	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten melalui JIKN	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 pengguna	80.000.000,-	

	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10 laporan	50.000.000,-	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah	Dinas Perpustakaan Kab. HSU	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10 laporan	50.000.000,-	
--	--	-----------------------------	--	------------	--------------	--	-----------------------------	--	------------	--------------	--

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan dengan adanya kamus usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada 2 (dua) usulan masyarakat yang diverifikasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan. Melalui berbagai pembahasan dan rapat antar stakeholder yang mempunyai kewenangan, maka usulan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan plavon anggaran 2023. Adapun usulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usulan dari Desa Rintisan Kec. Danau Panggang yaitu tentang layanan perpustakaan keliling
2. Rolling buku layanan perpustakaan desa “Bunga Ilmu” pada Desa Paminggir Kec. Paminggir.

Tabel 2.11

### USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN

No	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Program Pembinaan Perpustakaan/ Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Perpusdes Bunga Ilmu Desa Paminggir Kec. Paminggir	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	48.900.000	Sudah diverifikasi SKPD
2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/ Kota	Rintisan kec. Danau Panggang	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/ kota melalui peningkatan koleksi	10.056.000	Sudah diverifikasi SKPD

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi-Misi Presiden Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju : “Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” diterjemahkan dalam 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
2. Pembangunan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 Agenda Pembangunan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki keterkaitan dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Sasaran dan indikator dalam pelaksanaan Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

untuk mencapai yaitu bahwa dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta Melakukan revolusi karakter bangsa dengan melaksanakan program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan dari program tersebut, perlu keselarasan dengan program dan kegiatan pada Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI.

##### **a. Bidang Perpustakaan**

- Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar membaca, Perpustnas RI memberikan fasilitas pembangunan Perpustakaan model tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan, dan fasilitas perpustakaan keliling serta fasilitas pengembangan perpustakaan umum desa/ kelurahan.

Kegiatan tersebut selaras dengan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan diadakannya layanan perpustakaan daerah, layanan perpustakaan keliling, serta pembinaan dan pengembangan minat baca pada semua lapisan masyarakat.

- Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perpustakaan, teknis perpustakaan, manajemen perpustakaan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan diadakannya Bimbingan teknis untuk Pengelola Perpustakaan Desa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi, salah satunya kegiatan adalah peningkatan jam layanan perpustakaan umum daerah (lembur kerja layanan perpustakaan)
- Peningkatan kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi dengan memaksimalkan layanan perpustakaan digital iHSU, yaitu dengan penambahan koleksi digital.
- pengembangan koleksi daerah harus dapat diakomodir sebagai upaya penyelamatan local konten sebagai sebuah kekhasan budaya local yang dapat terpelihara dengan baik. Disinilah peran perpustakaan hadir untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat peradaban daerah dan pusat informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Peningkatan promosi, publikasi dan event-event yang bertajuk pengembangan minat baca harus dapat dilaksanakan sebagai upaya pemasyarakatan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, karena tanpa adanya publikasi dan promosi perpustakaan, lama kelamaan perpustakaan akan ditinggalkan oleh pemustakanya.
- Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah salah satu upaya berbasis inklusi adalah program nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang dapat mengurangi angka kemiskinan.

b. Bidang Kearsipan

- Dalam rangka peningkatan apresiasi pemerintah terhadap Arsiparis, pengelola kearsipan, ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui Bimtek Kearsipan yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hulu Sungai Utara dengan peserta dari seluruh SKPD se Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Sarana dan prasarana kearsipan adalah aspek yang memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depo Arsip untuk penyimpanan. Hal ini sudah terealisasi, Hulu Sungai Utara telah memiliki depo arsip berlantai 2 untuk penyimpanan arsip daerah. Tetapi untuk tahun depan kami berharap agar ditambah depo arsip karena penyimpanan yang ada hampir penuh.
- Upaya peningkatan pengembangan di bidang teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip telah mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di bidang kearsipan. ANRI telah membangun *e-arsip* dengan mengimplementasikan SIKD dan SIKN untuk mendukung birokrasi modern.

Atas dasar keselarasan tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaedah kearsipan dengan efisien dan efektif.



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai Renstra Dinas Perpustakaan 2023-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembaungan Daerah (RPD) 2023-2026, maka rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renja SKPD Dinas Perpustakaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

#### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Tujuan RPD ke (1) : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik			
Sasaran RPD ke (1) : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Peningkatan tata kelola dan manajemen kualitas pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Terpenuhinya administrasi keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana penunjang perangkat daerah
Tujuan RPD ke (4) : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Sasaran RPD ke (6) : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan			
Meningkatkan budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat melalui pembudayaan Kegemaran Membaca	Pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
			Peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum daerah sesuai perkembangan teknologi informasi
			Peningkatan koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat
			Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
	Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Peningkatan Penelusuran Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara	Terlaksananya seleksi naskah kuno dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara
Tujuan RPD ke (1) : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik			
Sasaran RPD ke (1) : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			
Meningkatkan kepatuhan OPD/BUMD/desa Terhadap kebijakan kearsipan	Meningkatnya kepatuhan OPD/BUMD/desa Terhadap kebijakan kearsipan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kearsipan
Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan bertanggung jawaban	Pengelolaan, perlindungan, dan Penyelamatan Arsip	Terkelolanya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

**Tabel 3.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**  
**DINAS PERPUSTAKAAN**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public	Terwujudnya tata kelola dan manajemen Dinas Perpustakaan yang akuntabel	Persentase terselenggaranya urusan penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatkan budaya literasi, gemar membaca, inovasi dan kreativitas masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional dan berbasis inklusi sosial untuk menuju kesejahteraan masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	12,70	12,80	12,90	13,00	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,00	12,50	13,00	13,50	
			Jumlah Pengunjung perpustakaan pertahun	15.000	17.000	19.000	21.000	
			Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.000	40.000	41.000	43.000	
			Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	2.134	2.137	2.140	2.143	
			Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	25	26	27	28	
			Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah
				Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan	358 judul	362 judul	367 judul	373 judul
3.		Meningkatkan Kepatuhan OPD/BUMD/Ormas/Orpol dan	Meningkatnya kepatuhan OPD/BUMD/Ormas/Orpol dan	Persentase Perangkat Daerah dan desa yang mengelola arsip secara baku	23,20%	23,20%	23,20%	30,20%

	Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Kearsipan	pemerintahan desa terhadap kebijakan kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan SKPD dan desa	120	120	120	111
			Jumlah OPD/BUMD/Ormas/Orpol dan pemerintah desa yang dilakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan	100	100	100	100
4	Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Persentase tingkat ketersediaan arsip	90,50%	91%	91,50%	92%
			Jumlah Arsip yang diakuisisi (Books)	500	750	900	1000
			Jumlah Arsip Statis yang dimasukkan di SIKN dan JIKN	100 berkas	125 berkas	150 berkas	175 berkas

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program / Kegiatan / Subkegiatan**

Perumusan Program dan Kegiatan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan 2023-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021/2022 mencakup 4 Program terdiri dari 11 kegiatan dan 30 subkegiatan yakni, sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

###### **A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

###### **B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

###### **C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi

###### **D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

###### **E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

## **2. Program Pembinaan Perpustakaan**

### **A. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota
- Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan
- Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota
- Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
- Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota

### **B. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

## **3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

### **A. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara

## **4. Program Pengelolaan Arsip**

### **A. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**

- Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
- Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota

### **B. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI

- Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis

### C. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

- Penyediaan Informasi, akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN
- Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safeguarding yaitu **transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi**. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga

keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Adapun rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
					<b>BELANJA OPERASI</b>			<b>12 bln</b>	<b>3.556.388.350</b>				<b>4.064.919.867</b>
2	23	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Kab. HSU	100%	3.131.388.350	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	3.214.919.867
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	Kab. HSU	100%	7.725.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	
2	23	1	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. HSU	1 dokumen	1.575.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1 dokumen	
				04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. HSU	2 dokumen	1.875.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		2 dokumen	
				06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	3 laporan	4.275.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		3 laporan	
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	100%	2.674.424.850			100%	



2	23	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. HSU	23 orang	2.673.434.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 orang	
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. HSU	1 laporan	990.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1 laporan	
2	23	1	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD	Kab. HSU	100%	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. HSU	2 orang		Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		2 orang	
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa pelayanan umum kantor	Kab. HSU	100%	67.297.500	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		100%	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	1 paket	1.560.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1 paket	
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	1 paket	5.500.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1 paket	
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. HSU	1 paket	3.440.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1 paket	
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	1 paket	13.500.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1 paket	
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. HSU	1Paket	13.297.500	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1Paket	
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. HSU	10 laporan	30.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		10 laporan	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang yang dibeli	Kab. HSU	100%	0	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100%	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. HSU	15 unit	0		15 unit	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. HSU	2 unit	0		2 unit	
2	23	1	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. HSU	100%	328.975.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100%	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. HSU	12 laporan	114.175.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12 laporan	
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. HSU	12 laporan	214.800.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12 laporan	
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara dengan baik	Kab. HSU	100%	52.966.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100%	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. HSU	10 unit	23.266.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10 unit	
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. HSU	4 unit	19.200.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4 unit	
				6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. HSU	25 unit	5.250.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25 unit	
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. HSU	15 unit	5.250.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15 unit	
2	23	2			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	<b>Kab. HSU</b>	<b>12.00</b>	<b>195.000.000</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan</b>	<b>12.50</b>	<b>410.000.000</b>

						Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat		12.70		Daerah Yang Sah		12.80	
2	23	2	2.01		Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. HSU	8.0	135.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		8.20	#REF!
2	23	2	2.01	2	Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. HSU	10 perpustakaan	9.747.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		10.000 kunjungan	
2	23	2	2.01	4	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standard nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. HSU	10 perpustakaan	15.202.875	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		40.000 kunjungan	
2	23	2	2.01	7	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Kab. HSU	2 layanan	67.500.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		30 perpustakaan	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. HSU	260 eksemplar	37.500.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1.000 eks	
2	23	2	2.01	10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. HSU	3 dokumen	5.050.125	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		500 eks	
2	23	2	2.02		Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)	Kab. HSU	8,5	60.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		8,5	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. HSU	6 perpustakaan	60.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		6 perpustakaan	
2	23	03			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	Kab. HSU	1 naskah	5.000.000	Lain-Lain Pendapatan		1 naskah	10.000.000

						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan / terdaftar yang ada di wilayahnya (judul)		358 judul		Daerah Yang Sah		362 judul	
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Kab. HSU	358 judul	5.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kab. HSU	38 eksemplar	5.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2	24	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentasi tingkat ketersediaan Arsip</b>	Kab. HSU	<b>90.50%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		<b>91.00%</b>	<b>430.000.000</b>
2	24	2	2.01		Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota		Kab. HSU	1000 berkas	85.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1000 berkas	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. HSU	50 berkas	30.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		50 berkas	
2	24	2	2.01	3	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. HSU	20 laporan	55.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		47 SKPD	
2	24	2	2.02		Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Jumlah arsip statis yang dipelihara	Kab. HSU		60.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		20 buah	
2	24	2	2.02	01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Kab. HSU	30 arsip	30.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		30 arsip	
2	24	2	2.02	02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. HSU	25 arsip	30.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		25 arsip	
2	24	2	2.03		Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Jumlah Tersedianya informasi dan layanan kearsipan	Kab. HSU		80.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		0%	

2	24	2	2.03	1	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tersedianya informasi dan layanan kearsipan di SKPD	<b>Kab. HSU</b>	10 pengguna	30.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		10 pengguna	
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah unit kearsipan/lembaga kearsipan yang diberdayakan	<b>Kab. HSU</b>	10 laporan	50.000.000	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		10 laporan	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2003 dan telah diubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2018, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaan tugas tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi dalam upaya membina dan mengembangkan sektor Perpustakaan dan Kearsipan sehingga terwujudnya masyarakat Hulu Sungai Utara Gemar Membaca Serta Terkelolanya Manajemen Arsip Secara Dinamis dan Profesional.

Dari capaian dan analisa kinerja diperlukan peningkatan terutama fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan, serta terselenggaranya Koordinasi dan Komunikasi yang baik antar Bagian Kesekretariatan dan Bagian-Bagian lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri maupun dengan Instansi/Dinas/Lembaga terkait lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dan Departemen/Kementerian terkait.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai antisipasi untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 adalah :

- ✓ Meningkatkan kinerja personal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya komitmen dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- ✓ Meningkatkan kesatuan persepsi dan rasa kebersamaan dalam pelaksanaan program serta meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi baik internal maupun eksternal dalam mengatasi permasalahan yang ada.

- ✓ Melanjutkan Program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan sektor Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- ✓ Perlunya dukungan dana untuk menunjang Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan serta sasaran dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Demikianlah Rencana Kerja ini kami buat untuk diketahui, semoga Allah SWT meridhoi usaha kita sekalian.

Amuntai, April 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara



**Hj. Lailatanur Raudah, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19620818 198302 2 003